

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang saling berkaitan, adapun tujuan utama yang akan dicapai adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator terpenting dalam proses evaluasi hasil terutama untuk menganalisis hasil dari upaya suatu negara atau wilayah dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengukur seberapa besar keberhasilan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mengalami penambahan jumlah dan kualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan jangka panjang yang dihadapi oleh suatu negara dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional riil. (Sukirno, 2000) dalam analisis makro menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai satu negara diukur dari perkembangan tingkat pendapatan nasional riilnya. Oleh karena itu, strategi yang digunakan dalam pembangunan ekonomi harus dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan serta mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Kuznets, (1995), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya kemajuan teknologi, institusional dan ideologi terhadap keadaan yang ada. Sedangkan menurut Ade Raselawati, (2011), ekonomi dikatakan bertumbuh apabila terjadi peningkatan produksi barang dan jasa dari tahun sebelumnya, oleh karena itu untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi harus menghitung laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam kurun waktu tertentu. Dan juga dapat menjadi ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pelaksanaan perekonomian.

Masalah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tergantung dari beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah faktor kebijakan pemerintah. Karena disetiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda, sehingga perlu mengenali dan mengidentifikasi masalah secara tepat dan cepat sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi bila dalam perekonomian terdapat beberapa faktor diantaranya, adanya investasi, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, teknologi, efisiensi dan pertumbuhan penduduk yang diukur dengan besarnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto dan laju pertumbuhan atas dasar harga konstan. Sehingga laju pertumbuhan setiap sektor dapat di gambarkan pada masing-masing sektor. Kriteria utama dalam keberhasilan pembangunan daerah adalah dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik secara sektoral maupun perkapita. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya.

Untuk mengukur maju tidaknya perekonomian daerah sebagai hasil dari program pembangunan daerah diperlukan alat pengukur yang tepat yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah barang yang dihasilkan suatu wilayah atau daerah selama satu periode dimana jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dinilai dengan uang atas dasar harga pasar yang sedang berjalan, Tarigan Robinson(2010).

Perkembangan ekonomi daerah yang baik akan meningkatkan investasi dan juga akan meningkatkan daya beli masyarakat serta memberikan dampak positif pada pertumbuhan pendapatan nasional. Selanjutnya adanya kenaikan investasi dan konsumsi menyebabkan kecenderungan terjadinya inflasi, dengan demikian maka perlu diatasi melalui penerapan strategi kebijakan ekonomi yang terpadu baik secara makro dan sektoral namun diharapkan tetap mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Pendekatan fungsi produk untuk menganalisis output secara agregat dapat menggunakan konsep fungsi produksi dari teori ekonomi perusahaan/mikro. Di dalam fungsi produksi disebutkan bahwa output merupakan

fungsi dari faktor produksi tanah, tenaga kerja, modal dan tingkat teknologi (faktor efisien). Sedangkan fungsi produksi agregrat menunjukkan hubungan fungsional antara output agregrat atau disebut juga dengan produk domestik bruto dengan stok input. Jika faktor produksi tanah merupakan bagian dari faktor produksi, modal dan teknologi dianggap konstan, maka hanya ada dua jenis faktor produksi yaitu modal dan tenaga kerja.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Tanjung Jabung Timur cenderung berfluktuatif, dimana rata-rata perkembangannya hanya 1,29%. Pada tahun 2020 terakhir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami pertumbuhan Produk domestik Regional Bruto yang negatif, angkanya mencapai -3,92 % lebih rendah jika dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto kabupaten lain yang ada di Provinsi Jambi. Dengan demikian Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi kabupaten dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto terendah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang berada di Provinsi Jambi. Berikut ini akan digambarkan dan dijelaskan bagaimana laju perkembangan dan kondisi Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tabel laju perkembangan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 1.1 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2017-2022

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Lapangan Usaha) (Milyar Rupiah)	Perkembangan PDRB
2017	Rp 16.748,26	3,07%
2018	Rp 17.241,20	2,94%
2019	Rp 17.967,59	4,21%
2020	Rp 17.262,51	-3,92%
2021	Rp 17.284,93	0,13%
2022	Rp 17.471,91	1,08%
Rata-rata Perkembangan PDRB (Persen)		1,29%

Sumber : Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung Timur, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 2017 ekonomi bertumbuh 3% dibanding tahun 2016. Dimana angka PDRB nya mencapai Rp. 1.674.826 (Milyar). Pada tahun 2018 juga mengalami pertumbuhan yang sama dengan PDRB sebesar Rp. 1.724.120 (Milyar). Sedangkan pada tahun 2019 PDRB mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu mencapai 4 % lebih dibanding pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya, dimana mencapai Rp.1.796.759 (Milyar). Namun, pada tahun 2020 ekonomi Tanjung Jabung Timur justru tumbuh negatif menjadi -4% dengan nilai PDRB sebesar Rp.1.726.251 (Milyar) menurun drastis dari tahun sebelumnya. Dari data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata perkembangan PDRB selama lima tahun terakhir hanya sebesar 1%. Yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi masih lemah.

Demikian juga Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari tahun sebelumnya, namun demikian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih mencapai angka -0,6% Faktor utama yang menjadi penyebab penurunan angka Produk Domestik Regional Bruto ini adalah adanya pandemi covid-19 beserta dampaknya terhadap perekonomian sehingga setiap sektor pada PDRB mengalami penurunan yang cukup drastis.

Namun pada tahun 2021 pemerintah Tanjung Jabung Timur berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 0%. Selain itu, nilai PDRB nya juga menunjukkan adanya peningkatan, dimana angkanya mencapai Rp.1.728.493 (Milyar). Hal yang sama juga dialami oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana pertumbuhan ekonominya naik menjadi 1,36%. Hal ini menunjukkan Pertumbuhan ekonomi kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Meskipun pertumbuhan ekonomi sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun kesejahteraan penduduk Tanjung Jabung Timur secara umum masih terjaga. Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan sebagai pengukur

keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia menjelaskan kondisi penduduk saat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pengetahuan dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tahun 2020 nilai IPM mencapai 64,43 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 63,92. Namun demikian, masalah kemiskinan yang juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat justru tergolong tinggi.

Sejak dilakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2000, dimana setiap daerah diberikan hak untuk memperoleh sumber keuangan dan ketersediaan biaya yang telah direncanakan pemerintah, seperti hak mendapatkan dana bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, memungut dan memperdayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mengelola kekayaan daerah dari sumber pendapatan lain yang sah, Adisasmitha, (2014).

Dalam hal otonomi daerah ini, yang mempengaruhi Produk domestik Regional Bruto diantaranya adalah infrastruktur jalan, partisipasi angkatan kerja, , investasi dan belanja modal. Hal ini sesuai dengan teori yang di gunakan dalam penelitian ini, dimana penelitian ini didasarkan pada model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow, bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi antara lain: modal, tenaga kerja dan teknologi. Dalam hal ini modal dilihat melalui belanja modal, investasi dan infrastruktur jalan, sedangkan tenaga kerja dilihat dari jumlah angkatan kerja yang bekerja.

Untuk mendorong peningkatan perekonomian, salah satu faktor yang diperlukan adalah sarana penghubung antar daerah yaitu jalan. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang berguna dalam peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Jalan merupakan infrastruktur yang sangat berperan dalam perekonomian nasional maupun wilayah karena dengan adanya infrastruktur jalan yang memadai akan memudahkan dalam proses pendistribusian barang/jasa antar

wilayah. Jadi, jalan merupakan sarana infrastruktur yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai pusat kegiatan.

Pembangunan infrastruktur jalan juga merupakan faktor pendorong maupun penghambat proses pertumbuhan ekonomi. Jika infrastruktur jalan tidak memadai, maka kegiatan ekonomi akan melemah. Terdapat korelasi atau hubungan yang saling keterkaitan antara pembangunan infrastruktur jalan dan aktifitas perekonomian karena diharapkan dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan, perekonomian akan mengalami perkembangan dan memiliki efek yang luas. Dengan adanya perkembangan ekonomi, infrastruktur jalan dapat digunakan dengan maksimal untuk pendistribsian barang dan jasa yang beredar di seluruh perekonomian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa infastruktur jalan merupakan sarana primer yang menjalankan roda perekonomian nasional. Perbaikan infrastruktur tentunya akan mendorong minat investasi bagi investor dalam negeri maupun luar negeri. Dapat kita lihat dalam beberapa tahun terakhir bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh perhatian pemerintah dalam pembanguan infrastruktur jalan khususnya. Infrastruktur yang memadai seharusnya dapat melancarkan pendistribusian barang/jasa antar wilayah yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah tingkat dua di Provinsi Jambi, Indonesia. Disisi lain daerah ini juga merupakan daerah yang cukup tertinggal dalam hal transportasi umum. Moda sarana transportasi jalan merupakan penghubung utama dari dan keluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Masih terdapat jalan yang belum layak di daerah plosok Kabupaten Tanjung Jabung Timr. Dimana jalan sulit untuk dilalui kendaraan roda empat atau lebih ketika kondisi hujan. Hal ini membuat sulitnya pengangkutan hasil lahan untuk keluar dari desa. Berikut ini data yang menampilkan perkemangan panjang jalan Kabupaten menurut kondisi yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2017-2022 :

Tabel 1.2 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2017-2022:

Tahun	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi (Km)				
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
2017	408,75	318,07	366,53	84,45	1177,81
2018	490,52	267,88	319,39	99,98	1177,77
2019	528,46	375,38	178,08	95,86	1177,77
2020	247,31	656,79	129,99	143,68	1177,77
2021	230,68	675,02	106,13	165,94	1177,77
2022	160,67	635,62	231,97	206,92	1235,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung Timur, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah panjang jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur cenderung tetap. Dimana pada tahun 2017, total panjang jalan sepanjang 1.177,80 km. Dengan jalan dalam kondisi baik sepanjang 408,75 km dan jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 84,45 km yang tergolong cukup redah angkanya di banding tahun sebelum dan sesudahnya. Nilai Persentase perkembangan panjang jalan pada tahun 2017 meningkat sebesar 16% dari tahun sbelumnya. Namun pada tahun 2018 sampai tahun 2021 total panjang jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum mengalami perubahan, yaitu berada di angka 1.177,77 km. Yang artinya belum ada perkembangan panjang jalan sampai tahun 2021 kemarin. Namun, pada tahun 2018 total panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan menjadi 490,52 km. Dan juga diikuti dengan peningkatan jumlah panjang jalan dalam kondisi rusak berat sebesar 99,98 km. Pada tahun 2019, panjang jalan dalam kondisi baik kembali meningkat menjadi 534, 09 km, namun panjang jalan dalam kondisi rusak berat justru mengalami penurunan. Yang menunjukkan adanya perbaikann jalan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun pada tahun 2020-2021 jumlah panjang jalan dalam kondisi buruk terus meningkat hingga mencapai 165,94 km pada tahun 2021. Sedangkan panjang jalan dalam kondisi baik mulai tahun 2020-2021 justru mengalami penurunan yang cukup drastis hingga mencapai 230,68 km saja.

Sama halnya dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang perkembangan jalannya cenderung tetap, Tanjung Jabung Barat Juga mengalami perkembangan jalan yang cenderung tetap, dimana pada tahun 2017-2021 total panjang jalannya berada di angka 1.265,20 km lebih panjang jika dibandingkan dengan panjang jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mulai dari tahun 2017-2021 jumlah panjang jalan dalam kondisi baik terus mengalami penurunan hingga mencapai 100,378 km di tahun 2021. Pada tahun 2017-2019 jumlah panjang jalan dalam kondisi rusak berat juga mengalami penurunan hingga mencapai 212,355 km di tahun 2019. Namun jumlahnya meningkat drastis di tahun 2020 menjadi 755,013 km. Dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 726,586 km.

Selain infrastruktur jalan, tenaga kerja juga turut mempengaruhi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Menurut teori human capital, Peran tenaga kerja yang berkualitas dapat meningkatkan penghasilannya melalui jenjang pendidikan yang telah ditempuhnya, semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang sangat diharapkan semakin tinggi pula penghasilan yang diterimanya dan membawa dampak positif terhadap perekonomian. Negara yang memiliki modal manusia yang bagus akan mudah dalam proses meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Modal Sumber Daya Manusia dipandang sebagai mesin pertumbuhan utama sebagai penggerak dan juga dapat mendorong kenaikan PDRB dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sumber Daya Manusia merupakan kunci utama dalam sektor riset hingga ditemukannya pemikiran atau ide yang baru. Karena Tenaga kerja merupakan faktor penting yang yaitu sebagai penggagas, pendorong dan pelaksana atau mengoperasikan seluruh sumber-sumber daya yang ada untuk menghasilkan suatu barang yang bernilai yang nantinya akan berpengaruh terhadap besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah Susanto, (2012). Kecenderungan faktor tenaga kerja mempengaruhi PDRB diperkuat dengan adanya fungsi produksi yang sering disebut sebagai fungsi Cobb-Douglas. Fungsi produksi menyatakan bahwa produksi suatu usaha

dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi dapat dibedakan menjadi empat golongan yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan teknologi.

Pembangunan segala bidang harus lebih ditekankan pada pertumbuhan sumber daya manusianya sendiri yang merupakan pembentuk PDRB Sumanto dan Effendie, (2018). Hal ini dikarenakan pelaksana dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam hal ini Tanjung Jabung Timur, adalah tenaga kerja yang merupakan bagian dari sumber daya manusia itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan atau adanya hubungan yang signifikan antara Produk Domestik Regional Bruto dengan tenaga kerja.

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Rata-rata perkembangan tenaga kerjanya hanya 0%. Hal ini karena sering terjadinya penurunan angka jumlah tenaga kerja yang bekerja. Perubahan jumlah tenaga kerja ini tidak sejalan dengan perubahan jumlah Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hal ini menggambarkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah Tenaga Kerja yang bekerja. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Umayanti.N, dan Utama.M, (2016), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara Tenaga Kerja dengan Produk Domestik Regional Bruto. Berikut ini digambarkan dalam Tabel Perkembangan Tenaga Kerja Kabupate Tanjung Jabung Timur Periode 2017-2022:

Tabel 1.3 Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2017-2022:

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (jiwa)
2017	119009
2018	114178
2019	112079
2020	119896
2021	115517
2022	119088

Sumber : Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung Timur, 2022

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2017, jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 3%, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 119.009 (jiwa). Dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar -4%, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 114.178 (jiwa). Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebesar -2%, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 112.079 (jiwa). Namun justru meningkat pada tahun 2020 sebesar 7%, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 119.896 (jiwa). Dan kembali mengalami penurunan sebesar -4% pada tahun 2021, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 115.517 (jiwa).

Sama halnya dengan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang juga mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2017, jumlah tenaga kerjanya mencapai 156.851 (jiwa). Kemudian meningkat sebesar 11% pada tahun 2018 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 174.870 (jiwa) berbeda dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang justru menurun di tahun yang sama. Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mengalami penurunan pada tahun 2019 mencapai -5% dengan jumlah tenaga kerja 165.862 (jiwa) lebih parah jika di dibandingkan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang hanya -2%. Dan kemudian meningkat sebesar 8% di tahun 2020, dengan jumlah tenaga kerja sebesar 179.842 (jiwa). Namun kembali meurun di tahun 2021 dimana persentase perkembangannya hanya 0%., dengan jumlah tenaga kerja mencapai 179.622 (jiwa).

Selain dari faktor-faktor diatas, penanaman modal asing yang terserap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga turut mempengaruhi nilai Produk Domestik Regional Bruto. Dengan adanya penanaman modal ini diharapkan dapat mendukung perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga dapat turut serta dalam meningkatkan nilai Produk Domestik Regional Bruto. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur, nilai investasi asing di Kabupaten Tanjung Jabung timur mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor pandemi yang juga dirasakan seluruh penjuru dunia sehingga berdampak pada menurunnya

jumlah investasi. Berikut tabel yang menampilkan perkembangan Penanaman Modal Asing di kabupaten tanjung jabung timur periode 2017-2021:

Tabel 1.4 Penanaman Modal Asing Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2017-2021

Tahun	PMA (juta rupiah)
2017	119.753
2018	161.492
2019	69.995
2020	16.968
2021	29.573
2022	23.347

Sumber : Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung Timur, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perkembangan Penanaman Modal Asing di Kabupaen Tanjung Jabung Timur cukup berfluktuasi, dapat dilihat pada tahun 2017 nilai PMA sebesar Rp.119.753.000.000 dengan persentase perkembangan sebesar -14%, sedangkan nilai PDRB tidak mengalami perubahan. kemudian meningkat drasstis di tahun 2018 dengan persentase peningkatan sebesar 35%. Mulai tahun 2019-2020 terus mengalami penurunan yang sangat drastis mencapai -76%, sedikit berbeda dengan nilai PDRB tahun 2019 yang justru mengalami peningkatan, namun juga mengalami penurunan yang drastis di tahun 2020 yakni mencapai -4%. Hal ini sebagai dampak dari pandemi covid yang terjadi dari tahun 2019.

Selain faktor-faktor diatas, belanja modal atau pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, dimana jika pengeluaran pemerintah atau belanja modal meningkat maka akan meningkatkan permintan agregat, hal ini berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan PDRB. Untuk itu peran pemerintah sangatlah penting agar mandiri dalam mengelola keuangan rumah tangga nya.

Terkait dengan fungsi dan tugas pemerintah daerah dalam masa otonomi daerah akhir-akhir ini maka, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peranan

identifikasi potensi dan sumber perolehan keuangan daerah menjadi sesuatu yang amat penting. Ini diharapkan akan mampu memberikan informasi yang lebih akurat mengenai alternatif sumber-sumber penerimaan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara implisit ketersediaan data mengenai perkembangan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dijadikan bahan referensi bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan dan pola kebijakan pemerintah daerah terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang sekaligus dapat berfungsi sebagai sarana evaluasi sejauh mana tingkat kemandirian dan desentralisasi fiskal daerah di masa otonomi daerah sekarang ini. Mengingat belanja modal merupakan salah satu alat atau instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka dalam pelaksanaan otonomi daerah proses penyusunan dan pelaksanaan belanja modal harus sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan publik atau masyarakat.

Dalam kaitan dengan ini, belanja modal harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur, belanja modal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama lima tahun terakhir angkanya cukup berfluktuatif. Hal ini dapat dijelaskan dengan tabel perkembangan belanja modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2017-2022 seperti berikut:

Tabel 1.5 1 Belanja Modal Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2017-2022.

Tahun	Belanja Modal (Rp)
2017	Rp275.104.187.921
2018	Rp312.956.563.764
2019	Rp371.192.128.413
2020	Rp215.113.216.715
2021	Rp253.271.578.263
2022	Rp293.540.721.410

Sumber : Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung Timur, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017, nilai persentase perkembangan belanja daerah menurun dari tahun sebelumnya senilai -25% dengan total belanja modal sebesar Rp. 275.104 (Milyar). Meningkat di tahun 2018 sebesar 14% dengan total belanja modal Rp.312.956 (Milyar), dan kembali meningkat di tahun berikutnya menjadi 19% dengan total belanja modal sebesar Rp. 371.192 (Milyar) namun terjadi penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020 yaitu sebesar -42%, hal ini terjadi sebagai dampak dari adanya covid-19, dimana pendapatan daerah yang dapat kita lihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto mengalami pertumbuhan yang negatif menjadi -4% sehingga anggaran belanja modal dipangkas menjadi Rp.215.113 (Milyar).

Kemudian terjadi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto yang sangat signifikan pada tahun 2021 yakni sebesar 0%, dengan nilai total Produk Domestik Regional Bruto sebesar Rp. 17.284,960 (Milyar) . Hal ini juga diikuti dengan pertumbuhan belanja modal menjadi 18% dengan jumlah belanja modal sebesar Rp.253.271 (Milyar). Peningkatan belanja modal ini dilakukan untuk mendorong perekonomian agar kembali pulih sehingga. Adapun rata-rata perkembangan belanja modal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode 2017-2021 adalah sebesar -3%.

Demikian juga dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, nilai belanja modal juga mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2017 nilai belanja modal mencapai Rp.267.089 (Milyar). Dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai Rp.702.411 (Milyar) dengan persentase perkembangan mencapai 26%. Namun juga mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2020 sebagai dampak dari adanya pandemic. Dimana total belanja modal turun mencapai Rp.277.354 (Milyar). Namun juga mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 sebesar Rp.490.378 (Milyar) jauh lebih tinggi peningkatannya jika dibandingkan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang hanya sebesar 28%.

Diketahui bahwa pada awal tahun 2022 jalan yang menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah rampung di perbaiki dimana tepatnya jalan di area PT. WKS sepanjang \pm 5 km juga

merupakan salah satu jalan yang sulit dilalui mobil karena kondisinya buruk dan berlubang. Namun demikian, masih banyak infrastruktur jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dalam kondisi buruk, khususnya jalan provinsi penghubung pelabuhan Nipah Panjang, kawasan perkebunan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kota Jambi dimana di lokasi ini sering terjadi kecelakaan karena kondisi jalan yang buruk. Namun Infrastruktur jalan di Kabupaten ini mengalami peningkatan mulai dari tahun 2017- 2021 terakhir dibandingkan tahun sebelumnya namun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 justru mengalami penurunan. Meskipun menunjukkan peningkatan pada tahun 2021. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Wahyunadi Dkk, (2021), yang menyatakan bahwa infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan hingga mencapai -2% pada tahun 2019. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto justru terus mengalami peningkatan pada periode yang sama hingga mencapai 4% pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja justru mengalami peningkatan yang signifikan yakni mencapai 7%. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto menurun drastis mencapai -4%. Dan pada tahun 2021, ketika Produk Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan mencapai 0%, jumlah tenaga kerja justru menurun hingga -4%. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara keduanya. Tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibisono, E. Dkk, (2019) yang mengatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Nilai Penanaman Modal asing di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2017 mengalami penurunan yang drastis disaat nilai PDRB tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2019 juga menunjukkan hubungan yang negatif, dimana nilai PMA mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan nilai PDRB justru mengalami peningkatan. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh

Ali.R, Altiner.A, (2012) yang mengatakan bahwa investasi asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa mulai dari tahun 2017-2021 pertumbuhan belanja modal cenderung berjalan searah dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Namun jumlah belanja modal pada tahun 2017 mengalami perkembangan yang negatif yaitu mencapai -25%, sedangkan pertumbuhan Produk Domestik regional Bruto mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 3%. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari Lisa, (2021) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan yang searah dan signifikan antara belanja daerah dan Produk Domestik Regional Bruto. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto, sehingga penulis mengangkat judul **Determinan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanjung Jabung Timur.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
- b. Strategi apakah yang dapat meningkatkan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah diatas dimana tujuannya adalah sebagai berikut :

- a) Untuk menentukan faktor apa yang mempengaruhi PDRB di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b) Untuk merumuskan strategi yang dapat meningkatkan PDRB di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi akademik, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta strategi untuk meningkatkan PDRB tersebut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB serta strategi untuk meningkatkannya.